

PERAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) OGAN KOMERING ULU SEBAGAI
JEMBATAN KOMUNIKASI ANTARA MASYARAKAT SIPIL DAN PEMERINTAH DI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Reri Arista^{1*}, Reres Anita², Anadia Maudi³, Wahyu Pratiwi⁴, Ally Roni⁵, Eva Susanti⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas
Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indonesia

Email: reriarista2@gmail.com^{1*}, resanita2022@gmail.com², anadiamaudi@gmail.com³,
Wpratiwi443@gmail.com⁴, allyroni8@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Ogan Komering Ulu sebagai mediator antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Dalam konteks sosial-politik di wilayah tersebut, PMII berperan sebagai aktor penting dalam menyuarakan aspirasi publik, mendorong perubahan kebijakan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi peran, strategi komunikasi, dan efektivitas PMII dalam menjembatani hubungan antara warga dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMII OKU berkontribusi dalam membuka ruang dialog, memberikan pendidikan politik, serta membantu penyelesaian berbagai isu publik. Namun, PMII masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas internal dan respons pemerintah yang belum optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa PMII memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan komunikasi dan interaksi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kata Kunci: PMII, Komunitas Sipil, Komunikasi Politik, Advokasi, Pemerintah Setempat, Ogan Komering Ulu.

ABSTRACT

This study is designed to analyze the position of the Indonesian Islamic Student Movement (PMII) in Ogan Komering Ulu as a mediator between civil society and the local government. Within the socio-political context of the region, PMII plays a crucial role in expressing public aspirations, advocating for policy changes, and enhancing community participation in governance affairs. The research employs a descriptive-qualitative method to identify PMII's roles, communication strategies, and its effectiveness in

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

bridging the relationship between citizens and the government. The findings indicate that PMII OKU contributes to creating spaces for dialogue, providing political education, and assisting in addressing various public issues, although the organization still faces challenges such as limited internal capacity and insufficient governmental responsiveness. Overall, PMII demonstrates a significant contribution to improving interactions between civil society and the local government in Ogan Komering Ulu Regency.

Keywords: PMII, Civil Society, Political Communication, Advocacy, Local Government, Ogan Komering Ulu.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis sebagai aktor sosial yang berada di persimpangan antara kepentingan masyarakat dengan struktur kekuasaan pemerintahan. Mahasiswa dipandang sebagai kelompok yang memiliki moral force dan intellectual force, sehingga sering kali menjadi penggerak perubahan sosial, pengkritik kebijakan, sekaligus mediator dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Salah satu organisasi yang memiliki posisi penting dalam konteks lokal adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ogan Komering Ulu (OKU). Di tengah kompleksitas persoalan sosial, politik, dan pemerintahan daerah, PMII OKU tampil sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berupaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, responsif, dan akuntabel.

Ogan Komering Ulu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan memiliki dinamika sosial tersendiri. Kebutuhan masyarakat akan transparansi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta akses terhadap ruang partisipasi masih menjadi isu yang kerap muncul dalam diskusi publik. Namun, tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah. Di sinilah PMII OKU memainkan fungsi penting sebagai jembatan komunikasi, baik melalui dialog formal, kegiatan advokasi, edukasi politik, maupun penyampaian rekomendasi berbasis kajian lapangan.

Aktivitas PMII OKU dalam merespons isu-isu sosial menunjukkan bahwa organisasi ini tidak sekadar berfungsi secara internal melalui proses kaderisasi, tetapi juga berusaha menjangkau persoalan publik secara lebih luas. PMII menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menganalisis problem daerah, menyuarakan kebutuhan masyarakat, serta mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan bersama. Kegiatan seperti diskusi isu strategis, forum audiensi, kolaborasi dengan lembaga pemerintah, hingga aksi advokasi menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam memperkuat peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil.

Hubungan PMII dengan pemerintah daerah OKU menunjukkan pola yang dinamis. Dalam banyak situasi, PMII bersikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, PMII juga sering menjadi mitra pemerintah melalui kegiatan sosial, program edukasi, dan kolaborasi peningkatan kapasitas masyarakat. Hubungan ini menunjukkan bahwa posisi PMII tidak kaku; mereka dapat berperan sebagai pengkritik, pengawas kebijakan, sekaligus mitra strategis. Fleksibilitas posisi ini mencerminkan

pendewasaan organisasi yang memahami bahwa fungsi masyarakat sipil tidak selalu identik dengan oposisi, tetapi juga melibatkan kerja sama konstruktif untuk kepentingan publik.

Namun, dalam menjalankan perannya, PMII OKU juga dihadapkan pada berbagai hambatan. Tantangan tersebut dapat berupa keterbatasan kapasitas kader, dinamika internal organisasi, minimnya dukungan struktural, hingga respons pemerintah yang tidak selalu terbuka terhadap kritik dan rekomendasi. Selain itu, tekanan politik lokal dan minimnya forum komunikasi resmi antara organisasi mahasiswa dan pemerintah membuat proses penyampaian aspirasi masyarakat sering kali terhambat. Meski demikian, berbagai upaya PMII untuk mengatasi tantangan tersebut memperlihatkan komitmen organisasi dalam menjaga stabilitas peran mereka sebagai jembatan komunikasi.

Kegiatan PMII yang berdampak langsung kepada masyarakat menjadi indikator penting dalam penelitian ini. Program-program seperti edukasi politik, pendampingan sosial, advokasi kebijakan, hingga kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa PMII tidak hanya menjalankan aktivitas organisasi semata, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu publik dan hak-haknya. Dampak ini terlihat melalui meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peran pemerintah, terbukanya ruang dialog baru antara warga dan pejabat daerah, serta munculnya rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat.

Melihat relevansi dan kompleksitas peran PMII OKU, penting dilakukan penelitian mendalam untuk memahami bagaimana organisasi ini menjalankan fungsinya sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Kajian ini menjadi urgensi akademik dan sosial, mengingat keberadaan PMII dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan partisipatif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana organisasi mahasiswa beradaptasi dengan tantangan struktural dan politik dalam konteks daerah yang terus berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini mengangkat persoalan mengenai efektivitas, kontribusi, serta hambatan yang dihadapi PMII OKU dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Fokus kajian tidak hanya terletak pada aktivitas organisasi, tetapi juga pada strategi komunikasi, kapasitas internal, mekanisme advokasi, serta hubungan antara PMII dengan aktor pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran PMII Ogan Komering Ulu sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Ketua Cabang PMII OKU, Emi Pratiwi. Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang berfokus pada kondisi organisasi, program kerja, hubungan dengan pemerintah, bentuk advokasi, tantangan organisasi, dan dampak kegiatan PMII bagi masyarakat.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yakni menyeleksi dan mengelompokkan jawaban wawancara sesuai tema penelitian seperti peran PMII, program kerja, advokasi, hubungan dengan pemerintah, tantangan, dan dampak organisasi. Kedua, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif untuk melihat keterkaitan temuan secara lebih jelas. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu

menginterpretasikan makna jawaban informan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran PMII OKU sebagai jembatan komunikasi. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif dari perspektif informan.

Instrumen wawancara berisi pertanyaan mengenai: fokus kegiatan PMII OKU, program kerja yang terkait pemerintah daerah, hubungan dengan pemerintah, peran strategis PMII sebagai organisasi masyarakat sipil, posisi PMII dalam menghadapi persoalan publik, pengalaman advokasi, bentuk PMII dalam menjembatani aspirasi masyarakat, tanggapan pemerintah terhadap kritik, keberadaan forum komunikasi, kegiatan yang berpengaruh bagi masyarakat, dampak aktivitas PMII, tantangan organisasi, cara menghadapi kendala internal dan eksternal, harapan masa depan, serta pandangan tentang peran PMII lima tahun ke depan.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam dinamika sosial-politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), keberadaan organisasi mahasiswa memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. PMII Ogan Komering Ulu, sebagai bagian dari jaringan organisasi Cipayung, menunjukkan kapasitas strategis sebagai penghubung yang mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam bahasa kebijakan sekaligus membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Pembahasan ini menguraikan bagaimana PMII OKU menjalankan fungsi komunikatif tersebut, strategi yang digunakan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memperkuat relasi antara warga dan pemerintah.

PMII OKU menjalankan peran advokatif melalui identifikasi isu yang berkembang di masyarakat dan penyampaian aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah. Proses ini dilakukan melalui diskusi publik, audiensi, kajian kebijakan, serta komunikasi informal dengan pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan organisasi Cipayung seperti HMI, GMNI, dan IMM turut memperkuat legitimasi gerakan advokasi tersebut. Jaringan Cipayung memberikan dukungan struktural dan intelektual yang membuat kegiatan advokasi lebih sistematis, terutama ketika menysasar isu-isu prioritas seperti pelayanan publik, kepemudaan, dan kesejahteraan sosial.

Fungsi edukasi publik yang dijalankan PMII turut membangun kapasitas masyarakat dalam memahami hak-hak sipil serta mekanisme partisipasi dalam pemerintahan. Melalui kegiatan seperti seminar, diskusi literasi demokrasi, pelatihan kepemimpinan komunitas, dan kampanye partisipatif, PMII berupaya menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan sadar terhadap proses pengambilan kebijakan. Kegiatan ini tidak hanya memperluas wawasan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan warga terhadap peran mahasiswa sebagai mediator yang berpihak pada kepentingan publik.

Sementara itu, peran mediasi menjadi salah satu kontribusi penting PMII OKU dalam memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ketika warga mengalami kesulitan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung atau ketika terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, PMII hadir sebagai fasilitator dialog yang mampu menjembatani dua kepentingan tersebut. Pendekatan komunikatif yang persuasif, dialogis, dan berbasis data membuat interaksi antara kedua pihak berjalan lebih konstruktif. Dalam sejumlah forum, PMII dan Cipayung berhasil mempertemukan masyarakat dengan pemerintah untuk membahas isu yang bersifat mendesak, sehingga membuka peluang bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mewarnai pelaksanaan peran PMII di tingkat lokal. Keterbatasan sumber daya organisasi, baik dari aspek pendanaan maupun jumlah

kader yang aktif, sering memengaruhi konsistensi program advokasi dan edukasi. Selain itu, adanya hambatan struktural berupa resistensi sebagian elemen birokrasi terhadap kritik mahasiswa membuat proses mediasi tidak selalu berjalan lancar. Dalam beberapa situasi, dinamika politik lokal juga memengaruhi pola komunikasi antara PMII dan pemerintah daerah.

Meskipun menghadapi hambatan tersebut, peran PMII OKU tetap memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Melalui kerja advokasi, edukasi, dan mediasi yang dilakukan secara kolaboratif bersama jaringan Cipayung, PMII mampu mengembangkan ruang dialog yang lebih terbuka, memperkuat partisipasi publik, serta membantu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif. Kontribusi ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa, khususnya PMII OKU, memegang posisi strategis dalam menjaga demokrasi lokal dan memastikan masyarakat memiliki saluran yang efektif untuk menyampaikan aspirasi mereka.

KESIMPULAN

PMII Ogan Komering Ulu memegang peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Melalui fungsi advokasi, edukasi publik, serta mediasi, PMII mampu menghadirkan ruang dialog yang lebih terbuka dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Dukungan jaringan organisasi Cipayung turut memperkuat legitimasi serta kapasitas gerakan dalam menyampaikan aspirasi publik dan mengawal isu-isu sosial di Kabupaten OKU.

Peran PMII tidak terbatas pada penyampaian kritik, tetapi juga mencakup upaya konstruktif dalam membangun komunikasi yang seimbang antara warga dan pemerintah. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya organisasi, resistensi sebagian birokrasi, dan dinamika politik lokal, PMII OKU tetap berusaha memposisikan diri sebagai mediator yang independen dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kontribusi ini menunjukkan bahwa keberadaan PMII sebagai aktor masyarakat sipil memiliki dampak positif dalam memperkuat partisipasi publik serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan responsif.

SARAN

1. Bagi PMII OKU, diperlukan penguatan kapasitas organisasi melalui peningkatan jumlah kader aktif, pelatihan advokasi, serta pengembangan kajian berbasis data agar proses komunikasi dengan pemerintah semakin efektif dan memiliki daya tawar lebih kuat.
2. Bagi Pemerintah Daerah OKU, penting untuk membuka kanal dialog yang lebih inklusif dengan organisasi mahasiswa, termasuk PMII dan kelompok Cipayung lainnya, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara cepat dan tepat.
3. Bagi masyarakat, diperlukan partisipasi yang lebih aktif dalam forum-forum yang difasilitasi PMII maupun pemerintah daerah agar proses advokasi dan penyampaian aspirasi berlangsung secara representatif dan mencerminkan kebutuhan warga.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk melakukan penelitian komparatif dengan organisasi masyarakat sipil lainnya atau menggunakan pendekatan partisipatif agar gambaran hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahriyyah, D., & Taufiqurokhman. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71-84.
- Hakim, F. (2023). Relasi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam penyelesaian isu publik. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 6(1), 55-68.
- Harahap, S. (2022). Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan daerah: Analisis peran kelompok organisasi lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 3(2), 112-126.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, dan agenda kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahmawati, A. (2023). Peranan organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(6), 1-10.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretatif & konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, E. (2015). *Komunikasi pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suryadinata, B. (2020). Komunikasi partisipatif antara masyarakat dan pemerintah daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 8(1), 33-47.
- Wahid, A. (2018). *Organisasi mahasiswa dan demokratisasi di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.